

Dinamika Pengelolaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Pada Kampus Swasta

Alfikalia ^{1*}, Handrix Chris Haryanto ², Agustin Widyaningsih ³

¹ Universitas Paramadina, Indonesia

* alfikalia@paramadina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa serta memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa selanjutnya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diambil dengan menggunakan metode *focus group discussion* (FGD) terhadap 13 orang responden yang dibagi dalam tiga sesi FGD yang berbeda, yaitu sesi FGD bersama 2 orang wakil rektor, sesi FGD bersama 3 orang dekan, dan sesi FGD bersama 8 orang ketua program studi. Data yang diambil kemudian dikodekan untuk mendapatkan tema dan alur cerita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan program MBKM bagi mahasiswa adalah adanya inisiatif mahasiswa untuk terlibat, adanya mitra, arahan universitas untuk implementasi OBE yang mendukung MBKM serta dukungan pengelola fakultas dan prodi untuk mekanisme konversi nilai. Faktor penghambat yang diidentifikasi antara lain adalah kurangnya sosialisasi mengenai program, perspektif negatif terhadap program pada sebagian dosen, kurangnya panduan teknis, serta faktor keterbatasan sumber daya. Dari dinamika faktor pendukung dan penghambat dihasilkan beberapa rekomendasi kepada Kemendikbud sebagai regulator dan kepada para pengambil kebijakan di Universitas Paramadina.

Kata Kunci: *Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, MBKM, Mahasiswa*

Pendahuluan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (MBKM) pada tanggal 24 Januari 2020. Salah satu program yang diluncurkan melalui kebijakan tersebut adalah hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa (selanjutnya disebut program MBKM untuk mahasiswa). Pada program ini, perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswa untuk secara sukarela mengambil (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di luar perguruan tingginya. Program hak belajar siswa ini kemudian dikuatkan dengan dimasukkannya program ini kedalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tujuan dari program ini adalah agar mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang menjadi minatnya serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi pasar kerja.

Kebijakan ini memberikan efek disrupsi bagi pengelolaan perguruan tinggi. Implementasi program ini pada institusi perguruan tinggi, baik pada perguruan tinggi negeri dan swasta, membutuhkan banyak perangkat mulai dari level universitas hingga level prodi, agar pada saat

mahasiswa mengambil haknya untuk belajar di luar program studinya, tidak akan mengalami kendala, misalnya dalam konversi nilai. Konversi nilai menjadi sesuatu yang harus dipikirkan karena terdapat 3 semester, yang berisi rata-rata 60 - 72 sks atau secara kasar 20 - 24 mata kuliah yang perlu dipikirkan mata kuliah apa yang akan dikonversi.

Universitas Paramadina (UPM) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta yang mengakomodasi program MBKM untuk mahasiswa dalam Kebijakan Akademik Universitas Paramadina No. KB-02/UPM/2020. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa universitas memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperkaya keilmuannya yang bersifat multidisiplin dengan mendapatkan pendidikan di luar program studi maupun di luar universitas dan hasil pembelajarannya dapat diakui sebagai transfer kredit. Mahasiswa UPM mulai mengikuti beberapa kegiatan dalam program ini sejak semester genap tahun ajaran 2020/2021 dengan mengikuti kegiatan magang bersertifikat, asistensi mengajar, dan kewirausahaan. Pada saat program MBKM untuk mahasiswa mulai dilaksanakan, ditemukan bahwa mahasiswa mengikuti program magang yang dibuka oleh Kemdikbud tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan program studi karena dalam pendaftarannya tidak memerlukan pengesahan dari program studi. Ditambah lagi, pada prodi tersebut, secara kurikulum, konversi nilai bagi mahasiswa yang mengambil program ini belum rampung. Situasi seperti ini membutuhkan adanya evaluasi terhadap proses pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa di Universitas Paramadina, agar pelaksanaan selanjutnya tidak lagi mengalami kendala.

Kajian terhadap pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa dilakukan dengan beberapa pendekatan. Beberapa kajian antara lain kajian Purwanti (2020) yang membahas secara konseptual mengenai bagaimana program MBKM bisa meningkatkan employability dari lulusan, kajian mengenai pengembangan modul pembelajaran untuk program MBKM (Rozi, Prawijaya, & Ratno, 2021), atau kajian mengenai bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan MBKM (Kamalia & Andriansyah, 2021). Selain topik-topik tersebut, kajian terhadap pelaksanaan program-program dalam kebijakan MBKM sudah mulai dilakukan. Hasil studi literatur Fuadi dan Aswita (2021) menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi adalah adaptasi kurikulum untuk mengakomodasi kebijakan MBKM, keterbatasan kampus mitra, kolaborasi yang masih sangat terbatas dengan mitra non perguruan tinggi, pengelolaan dana dari yayasan yang belum mengakomodasi kegiatan MBKM, serta kualitas dan produktivitas SDM dosen dan mahasiswa. Hasil kajian Fuadi dan Aswita (2021) menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh PTS untuk melaksanakan program ini menghadapi tantangan dari berbagai segi. Kajian penerapan MBKM juga dilakukan oleh Krishna Patria (2021) pada level program studi di universitas negeri di Bandung dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif menggunakan observasi dan studi dokumentasi, serta memanfaatkan posisi penulis sebagai pembimbing akademik. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan program MBKM untuk mahasiswa ini adalah penyesuaian kurikulum, perencanaan studi mahasiswa sampai selesai, persepsi terhadap perguruan tinggi mitra dalam kegiatan pertukaran pelajar bila perguruan tinggi mitra dianggap memiliki level di bawah dari perguruan tinggi asalnya, kesiapan sistem informasi akademik universitas bila ada mahasiswa mengambil mata kuliah di program studi yang berbeda serta ketidakjelasan cara penyelenggaraan program magang.

Dari kajian mengenai pelaksanaan kegiatan MBKM, dapat disimpulkan bahwa masing-masing institusi perguruan tinggi memiliki kesiapan yang berbeda untuk menjalankan program ini, masing-masing kajian melakukan metode dan level analisis yang berbeda-beda juga. Hasil kajian Krishna Patria (2021) menunjukkan bahwa ada interaksi antara apa yang disiapkan pada level universitas dengan pelaksanaan level prodi walaupun tidak dibahas secara mendalam.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa perlu dilihat juga dari proses pelaksanaan program tersebut. Evaluasi proses pelaksanaan merupakan bentuk evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan kualitas implementasi dari program (Mertens & Wilson, 2019). Lebih lanjut, Mertens & Wilson (2019) mengutip dari W. K. Kellogg Foundation pada tahun 2004 bahwa salah satu bentuk pertanyaan yang diajukan dalam mengevaluasi proses adalah aspek apa saja dari proses pelaksanaan program yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program. Pertanyaan ini perlu diajukan kepada pengambil kebijakan di lingkungan perguruan tinggi, baik di level universitas, fakultas, maupun program studi karena dalam pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa, kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masing-masing level dapat mempengaruhi kelancaran studi mahasiswa yang mengikuti program ini dan pencapaian tujuan kebijakan MBKM.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif studi kasus dalam hal ini memiliki tujuan untuk mencakup informasi mengenai fenomena utama yang mengarah pada sebuah entitas salah satunya terkait organisasi. Pendekatan studi kasus nantinya dapat melakukan eksplorasi lebih jauh terkait dengan satu kondisi yang dibatasi dengan satu sistem tertentu melalui penggalian berbagai data yang bersifat primer maupun sekunder yang pada akhirnya menjadi sebuah laporan deskripsi maupun tema-tema dari sebuah fenomena kasuistik yang diangkat. Dalam penelitian ini mengacu pada tema utama yaitu melihat pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Paramadina.

Responden dalam penelitian ini melibatkan 13 responden para pimpinan di universitas yang terdiri dari 2 wakil rektor yang terdiri dari wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan serta wakil rektor pengembangan sumber daya, 3 dekan yang terdiri dari dekan fakultas falsafah dan peradaban, dekan fakultas ekonomi dan bisnis serta dekan fakultas ilmu rekayasa dan 8 ketua program studi tingkat sarjana yang terdiri dari ketua program studi falsafah dan agama, ilmu komunikasi, hubungan internasional, psikologi, manajemen, desain komunikasi visual, informatika dan desain produk.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *focus group discussion* (FGD). Metode FGD merupakan salah satu bagian dalam proses pengambilan data kualitatif yang secara umum merupakan bentuk wawancara dalam sebuah kelompok tertentu (Creswell, 2018). Dalam pelaksanaan FGD nantinya perlu diarahkan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur maupun bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan maupun opini dari para partisipan yang terlibat. Dalam penelitian ini, proses FGD dilakukan dengan cara mengelompokkan partisipan sesuai dengan level jabatan maupun tugas pokok dan fungsinya. Kelompok pertama terdiri dari partisipan para wakil rektor, kelompok kedua terdiri dari partisipan para dekan fakultas dan kelompok ketiga terdiri dari partisipan pada ketua program studi tingkat sarjana.

Pengambilan data melalui FGD mendasarkan pada beberapa pertanyaan tidak terstruktur yang mengarahkan pada beberapa hal yaitu (1) Faktor apa saja yang mendukung universitas/fakultas/prodi dalam menjalankan program MBKM untuk mahasiswa, dan (2) Faktor apa saja yang menghambat universitas/fakultas/prodi dalam menjalankan program MBKM untuk mahasiswa.

Analisis data dalam pendekatan studi kasus ini mendasarkan pada tiga langkah yang dijelaskan oleh Creswell (2018) yaitu *open coding* yang meliputi pembuatan kategori terkait dengan data atau informasi yang sudah didapatkan, *axial coding* yang meliputi pemilihan kategori-kategori yang sudah dibuat menjadi susunan model teoritis dan *selective coding* yang merupakan tahap akhir dengan membangun rangkaian cerita dari hubungan antar kategori. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang baik maka dalam penelitian ini mengarahkan pada upaya pencapaian validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Strategi validitas yang digunakan dalam penelitian ini berupa *peer debriefing* (Creswell, 2018) yang berupa proses tanya jawab antara sesama rekan peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Dalam strategi ini, proses diskusi dan interpretasi antara sesama peneliti akan memberikan pengayaan pemaknaan yang muncul antara peneliti. Melibatkan interpretasi dari peneliti lain akan menambah validitas atas hasil penelitian. Untuk pencapaian reliabilitas dalam penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan *intercoder agreement* yang mengarahkan pada pemeriksaan ulang dan silang terkait dengan kode-kode yang sudah ada antara para peneliti agar bisa mendapatkan kesepakatan pemahaman yang sama terkait jawaban responden.

Hasil

Mahasiswa Universitas Paramadina (Paramadina) mulai mengikuti kegiatan program MBKM untuk mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian sejak semester genap tahun ajaran 2020/2021, yaitu program magang bersertifikat, asistensi mengajar, dan kewirausahaan. Sampai dengan semester gasal 2021/2022, total mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 41 orang, yang berasal dari 3 prodi yaitu prodi Ilmu Komunikasi, prodi Hubungan Internasional dan prodi Psikologi. Paramadina juga mendapatkan hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang diimplementasikan dalam kegiatan selama tahun 2021. Terkait dengan implementasi program MBKM untuk mahasiswa, dari sisi kebijakan, program ini sudah diakomodasi dalam kebijakan akademik universitas dan peraturan akademik. Panduan teknis pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM masih bersifat draft dan belum disosialisasikan. Program studi sarjana di Paramadina belum secara resmi menyiapkan kurikulum yang mengakomodasi kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam rangka kebijakan MBKM dan panduan konversi nilai bagi mahasiswa yang mengikuti berbagai kegiatan mahasiswa dalam kebijakan MBKM.

Penilaian Pengelola Universitas

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program

Didapatkannya hibah PK-KM oleh program studi (prodi) Ilmu Komunikasi pada tahun 2021 membuat sosialisasi cara implementasi program MBKM untuk mahasiswa menjadi lebih gencar dilakukan untuk fakultas, prodi, serta mahasiswa. Untuk menunjang keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan MBKM yang diselenggarakan pemerintah, rektorat telah menunjuk koordinator-koordinator tingkat universitas yang akan mengkoordinasi mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Dosen yang menjadi koordinator program magang, walaupun menghadapi kendala teknis dalam pengisian data-data terkait program magang berkenan memantau pengisian data sehingga bisa terlaksana dengan baik.

Mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan magang dan studi independen bersertifikat memiliki unjuk kerja yang bagus selama kegiatan, sehingga nama baik universitas terjaga, baik dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah maupun dalam kegiatan magang yang diselenggarakan dalam rangka hibah PKKM. Kegiatan magang dalam rangka hibah PK-KM juga ditunjang oleh adanya mitra Paramadina yang sudah ada sebelumnya yang juga puas dengan unjuk kerja mahasiswa pada saat magang.

Saat ini pihak Universitas menginstruksikan adanya evaluasi kurikulum seluruh prodi agar mengarah kepada kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) yang mengakomodasi program MBKM untuk mahasiswa, yang dapat menunjang pelaksanaan program di semester yang akan datang. Dalam rangka evaluasi kurikulum ini, universitas memfasilitasi penggunaan anggaran untuk evaluasi walaupun saat ini sudah tutup buku menjelang akhir tahun.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program

Pada saat sudah ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan dalam program MBKM untuk mahasiswa, belum ada petunjuk teknis implementasi program ini dan prodi masih belum memiliki sistem konversi mata kuliah, walaupun pada akhirnya segera disiapkan karena sudah ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM untuk mahasiswa dari Dikti. Kurikulum yang mengakomodasi program ini belum siap pada tingkat prodi karena sepanjang 2021 aktivitas lebih difokuskan kepada sosialisasi kurikulum OBE dan bagaimana mengintegrasikannya dengan MBKM.

Sumber daya dosen yang terbatas untuk bisa terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa. Dibutuhkannya sumber daya manusia tambahan yang akan menangani aspek administrasi akademik program MBKM untuk mahasiswa, yang memerlukan pemahaman cara pelaporan kegiatan pada sistem PDDikti. Dosen koordinator yang kegiatan magang bersertifikat mengalami kendala teknis dalam memasukkan data-data ke dalam sistem dari kementerian. Kampus masih belum siap dari sisi sarana prasarana dan pendanaan terkait pelaksanaan program.

Harapan Terhadap Pelaksanaan Program

Sosialisasi dari pihak Kemdikbud yang masih perlu ditingkatkan agar perguruan tinggi memiliki pemahaman yang sama terhadap program. Dikti sebagai regulator/fasilitator tidak melakukan penyeragaman terhadap kondisi masing-masing institusi, karena setiap perguruan tinggi memiliki sumber daya yang berbeda-beda, baik dari sisi jumlah mahasiswa, dosen, maupun aspek finansial. Dikti tidak mengumumkan suatu kegiatan yang harus diikuti oleh perguruan tinggi secara mendadak dan harus diselesaikan dalam waktu singkat. Dalam menyeleksi peserta kegiatan, Dikti hendaknya melakukan penyaringan agar mahasiswa yang masa studi dibawah lima semester tidak bisa mengikuti kegiatan.

Kesiapan prodi untuk terlibat dalam program-program dalam kebijakan MBKM dan prodi bisa menentukan sendiri aturan main terkait program MBKM untuk mahasiswa karena aturan utamanya sudah ada. Prodi memiliki inisiatif untuk memperkaya aturan-aturan yang perlu disiapkan. Kepada seluruh civitas academica secara umum agar tidak memiliki pandangan negatif terhadap program sehingga enggan untuk mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program MBKM untuk mahasiswa.

Penilaian Pengelola Fakultas

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program

Saat prodi belum siap dengan konversi mata kuliah untuk magang, dekan mengeluarkan memo mengenai mata kuliah umum fakultas yang bisa digunakan untuk konversi nilai dari kegiatan-kegiatan pada program MBKM untuk mahasiswa. Hal tersebut juga didukung oleh kesediaan prodi untuk mengeluarkan memo mengenai konversi sejumlah sks untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan asistensi mengajar, saat belum ada aturan konversi khusus dan bila mahasiswa menghasilkan 1 publikasi dari kegiatan magang, mahasiswa dianggap sudah memenuhi syarat untuk sidang skripsi.

Adanya mahasiswa yang berinisiatif ingin mengikuti program membuat fakultas tidak kesulitan mencari mahasiswa untuk berpartisipasi. Selain itu, saat belum ada pedoman yang jelas mengenai konversi, kesediaan mahasiswa untuk menerima penjelasan bahwa walaupun magang tersebut setara 20 sks, tidak bisa dikonversi semuanya dengan bobot sks mata kuliah, patut diapresiasi. Adanya mitra praktisi yang bisa dilibatkan dalam kegiatan magang pada hibah PKK dan juga menjadi dosen praktisi untuk mengembangkan wawasan mahasiswa. Dekan menilai bahwa ada mitra yang banyak dari kegiatan sebelumnya yang akan mendukung kegiatan magang yang akan datang. Sistem PJJ yang dilaksanakan saat ini membantu mahasiswa untuk mengikuti kuliah, saat ybs mengikuti kegiatan dalam program MBKM untuk mahasiswa.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program

Fakultas tidak berani sosialisasi gencar karena SOP, teknis, dan kebijakannya belum ada dari universitas. Pengelola prodi mengalami hambatan dalam memutuskan mata kuliah yang akan digunakan untuk konversi nilai karena menilai kurikulum mereka sudah bagus. Mahasiswa yang ingin mendaftar tidak koordinasi dengan prodi, sehingga mahasiswa yang belum memenuhi syarat semester, baru semester 3, tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan magang bersertifikat walaupun dia lolos seleksi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dari segi sistem, sistem informasi akademik universitas belum mendukung untuk konversi nilai, untuk pertukaran pelajar antar prodi di universitas dan juga untuk menandatangani MoU dengan mitra potensial.

Harapan Terhadap Pelaksanaan Program

Dekan melihat beberapa hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan program, antara lain pertama, adanya kebijakan, SOP yang bersifat teknis yang bisa diturunkan ke Fakultas. Kedua, komitmen dari seluruh level pimpinan termasuk pimpinan fakultas untuk mensukseskan program, serta perlu ada monitoring terukur yang beririsan dengan indikator renstra dan IPEPA. Dekan juga mengidentifikasi bahwa prodi membutuhkan penguatan dari atas untuk teknis pelaksanaan seperti konversi nilai, penyesuaian kurikulum. Dari aspek sumber daya, dekan mengidentifikasi perlu adanya pendanaan dari kementerian untuk program ini karena pendanaan pada universitas swasta terbatas. Adanya orang khusus yang menangani pelaksanaan kegiatan yang ada dalam program MBKM untuk mahasiswa. Harapan kepada regulator adalah bagaimana agar program-program dalam kebijakan MBKM menjadi program yang berkesinambungan, tidak hanya sesaat, sehingga tidak perlu ganti menteri ganti kurikulum.

Penilaian Pengelola Program Studi

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program

Dari segi sumber daya manusia, kaprodi menilai bahwa adanya inisiatif dan keinginan mahasiswa untuk terlibat dalam program MBKM untuk mahasiswa. Kaprodi tidak perlu mencari-cari mahasiswa untuk terlibat dalam program ini. Hal lain yang juga dinilai mendukung dari mahasiswa adalah daya saing. Kaprodi Teknik Informatika menyatakan bahwa saat mahasiswanya lolos program magang bersertifikasi dari Kemdikbud menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki daya saing. Hal tersebut juga menjadi umpan balik kepada program studi bahwa prodi sudah tepat dalam menyiapkan mahasiswanya. Hal senada juga disampaikan oleh Kaprodi Ilmu Komunikasi tentang bagaimana puasnya mitra magang prodi terhadap mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi yang magang di tempatnya. Terkait mitra untuk kegiatan MBKM, prodi sudah memiliki mitra dari kegiatan sebelumnya, namun belum dispesifikkan untuk kegiatan MBKM.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program

Terdapat kaprodi yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan MBKM belum disosialisasikan dengan baik, sehingga menimbulkan kekhawatiran pada dosen-dosen prodi akan kehilangan mata kuliah, terutama pada dosen senior. Sosialisasi yang dibutuhkan tidak hanya kepada dosen namun juga kepada mahasiswa, agar mahasiswa menyadari bahwa program tersebut dimulai untuk mahasiswa yang sudah memasuki semester 5. Hal ini diperlukan karena kaprodi mendapatkan pengalaman adanya mahasiswa semester satu yang ingin mengikuti program tersebut.

Kaprodi Psikologi juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan masih belum memahami bagaimana cara menerapkan program tersebut, terutama pada mahasiswa kelas karyawan dan juga karena harus menyesuaikan kurikulum, yang memang saat ini masih perencanaan karena perlu mengarah kepada kurikulum berbasis OBE. Pada kaprodi yang lain, kegiatan magang pada dasarnya sudah menjadi bagian dari kurikulum prodi, sebelum adanya kebijakan MBKM. Hal tersebut membuat bingung kaprodi mengenai siapa yang akan memberi nilai, apakah dari tempat magang atau dikombinasikan dengan nilai dari prodi. Kaprodi juga mempertanyakan mengenai kebijakan dosen pendamping kegiatan, terutama dalam kegiatan magang bersertifikat, apakah disiapkan satu orang per program studi atau ada satu di level universitas. Jika hanya ada satu per universitas, ditakutkan dosen tersebut tidak memiliki keahlian yang sejalan dengan kebutuhan di tempat magang mahasiswa. Menurut Kaprodi kompetensi dosen pendamping perlu sesuai dengan aktivitas magang yang dilakukan.

Terdapat kaprodi melaporkan adanya penilaian negatif dosen terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam program hak belajar di luar program studi, seperti program magang bersertifikat. Penilaian negatif ini berbentuk pertanyaan mengenai manfaat mahasiswa untuk bergabung ke industri, apakah mata kuliah yang ditinggal dapat digantikan oleh program magang. Ada kekhawatiran bahwa dengan membebaskan mahasiswa dengan program magang, akan terjadi penurunan kualitas karena mereka mendapatkan uang dan merasa tidak perlu ikut kuliah. Kondisi tersebut dibandingkan dengan mahasiswa yang lama dalam penyelesaian skripsi karena sudah mendapat kerja dan uang sendiri. Program magang dinilai dapat menyebabkan situasi negatif.

Dari sisi mahasiswa, walaupun ada mahasiswa yang berminat dengan program ini, namun minat ini tidak meluas. Mahasiswa yang tertarik adalah mahasiswa yang sebenarnya merupakan mahasiswa aktif, sehingga mahasiswa yang menunjukkan ketertarikannya adalah mahasiswa yang itu-itu saja. Manajemen prodi memiliki sumber daya yang terbatas. Jika semua (delapan) kegiatan dalam program MBKM untuk mahasiswa diambil semua, akan menjadi tumpang tindih dan dosen yang terserap kepada aktivitas magang mahasiswa dan industri akan semakin banyak, dan hal tersebut akan menyulitkan pengelolaan prodi karena prodi juga memiliki banyak rencana kegiatan.

Harapan Terhadap Pelaksanaan Program

Pada tingkat program studi, terdapat ketua program studi (kaprodi) yang mengharapkan agar kebijakan dan peraturan pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa yang sudah jelas dan disosialisasikan secara jelas dan menyeluruh, akan membantu pelaksanaan. Kebijakan, peraturan, SOP yang sudah jelas tidak akan membuat prodi meraba-raba dalam mengimplementasikan program ini. Kaprodi berharap agar dapat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, tidak hanya diberikan sosialisasi saja. Selain mahasiswa, unsur pendukung lainnya adalah perlunya sumber daya manusia khusus yang berfungsi sebagai koordinator kegiatan dari kedelapan jenis kegiatan belajar di luar kampus yang ada, apakah berada di tingkat universitas, fakultas, atau prodi.

Kaprodi menilai dibutuhkan sistem pendukung agar program MBKM untuk mahasiswa dapat dilaksanakan. Beberapa sistem pendukung yang dibutuhkan antara lain kanal khusus informasi MBKM. Kanal ini dibutuhkan karena ada beberapa versi informasi yang beredar, sehingga dibutuhkan satu zaman terpusat yang memberikan informasi mengenai proses administrasi untuk mengikuti program, publikasi mengenai program-program yang ada serta basis data lainnya ada dalam satu tempat. Manajemen yang baik dalam pelaksanaan program dinilai perlu oleh kaprodi sebagai wujud adanya prioritas dalam pelaksanaan program ini. Kegiatan di luar kampus yang bisa diambil mahasiswa tidak perlu banyak, misalnya dua saja, asalkan pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik.

Pembahasan

Penelitian ditujukan untuk menjawab dua hal, yaitu 1) faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa berdasarkan penilaian pengambil kebijakan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi terhadap, dan 2) rekomendasi yang bisa diberikan agar pelaksanaan kegiatan MBKM bagi mahasiswa diimplementasikan lebih baik lagi oleh para pengambil kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masing-masing level pengambil kebijakan, secara umum terdapat kesamaan dan perbedaan dalam faktor pendukung dan penghambat program MBKM untuk mahasiswa, dan terdapat dinamika dalam interaksi antar para pengambil keputusan yang dapat dijadikan bahan rekomendasi pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa selanjutnya.

Berdasarkan paparan hasil, kesamaan faktor pendukung yang diidentifikasi oleh pengambil keputusan di tingkat universitas, fakultas, dan prodi adalah dari sisi mahasiswa. Adanya inisiatif mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program membuat Paramadina secara keseluruhan institusi tidak perlu sulit mencari mahasiswa untuk terlibat dalam program ini, walaupun hal ini tidak terjadi di seluruh prodi. Kinerja mahasiswa yang baik dalam program magang merupakan hal yang mendukung karena menjaga nama baik universitas. Disisi lain, kinerja yang baik ini

menunjukkan bahwa mahasiswa Paramadina memiliki daya saing jika dibandingkan dengan mahasiswa dari universitas lain. Adanya mitra yang sudah bekerja sama sebelumnya, merupakan faktor yang diidentifikasi sebagai pendukung bagi pelaksanaan MBKM untuk mahasiswa di masa yang akan datang. Persepsi tentang mitra ini berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Fuadi dan Aswita (2021) yang menyatakan bahwa mitra untuk program magang menjadi kendala bagi perguruan tinggi swasta di Aceh.

Universitas saat ini mendorong agar prodi mengarahkan kurikulum kepada kurikulum berbasis OBE yang mengakomodasi program MBKM untuk mahasiswa. Hal tersebut akan mendukung pelaksanaan MBKM untuk mahasiswa di masa yang akan datang. Namun disisi lain menjadi penghambat pada pelaksanaan MBKM untuk mahasiswa pada saat ini karena kurikulum yang ada belum disiapkan untuk mengakomodasi program MBKM untuk mahasiswa, walaupun mekanisme konversi segera disiapkan saat diketahui adanya mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Saat ini prodi-prodi masih berproses dalam menyiapkan kurikulum OBE yang mengakomodasi program MBKM untuk mahasiswa. Kebijakan MBKM ini secara filosofis mengarahkan pada upaya untuk melakukan penataan semua unsur pendidikan diantaranya adalah kurikulum yang berorientasi pada kebebasan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang disukai, mendorong berkembangnya kesadaran serta keterampilan sosial mahasiswa, berbasis kompetensi dan karakter (Muslikh, 2020). Kurikulum yang mendasarkan pada pendidikan berbasis sistem OBE ini sendiri memiliki peran penting dalam pelaksanaan MBKM, yang mana keterlibatan pihak eksternal dalam merumuskan kurikulum, mendorong mahasiswa untuk menguasai keilmuan yang berguna, memberikan kesempatan mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang diinginkan, dan berorientasi pada perkembangan teknologi ini nantinya akan membentuk mahasiswa yang siap diterima dalam dunia kerja (Sopiansyah, et.al, 2021). Kebijakan dekan dan kaprodi yang dengan segera menyiapkan mekanisme konversi nilai saat adanya mahasiswa yang berpartisipasi dalam program MBKM untuk mahasiswa saat perangkat konversi nilai belum ada, menjadi faktor pendukung keberhasilan program ini. Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pengelola fakultas dan prodi pada dasarnya mendukung mahasiswa untuk mengembangkan dirinya, terlepas dari belum siapnya kebijakan dan aturan pendukung.

Keberadaan aturan teknis pelaksanaan MBKM untuk mahasiswa seperti panduan, SOP, merupakan faktor pendukung yang dinilai dibutuhkan oleh dekan dan kaprodi, namun masih belum ada. Dekan dan Kaprodi mengharapkan pengambil kebijakan universitas menyiapkan suatu panduan yang lebih teknis yang bisa digunakan oleh fakultas untuk disosialisasikan kepada prodi untuk diimplementasikan. Ketiadaan panduan yang sifatnya lebih teknis dari universitas membuat fakultas dan prodi akhirnya mensosialisasikan kegiatan ini kepada mahasiswa secara terbatas, disampaikan kepada mahasiswa yang bertanya saja. Ketiadaan panduan yang bersifat teknis ini juga berdampak pada mekanisme konversi nilai oleh prodi dan fasilitasi konversi nilai oleh fakultas baru dilakukan saat diketahui adanya mahasiswa yang lolos pada program MBKM untuk mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti. Permasalahan kebijakan maupun teknis pelaksanaan merupakan permasalahan yang juga terjadi di hampir sebagian universitas yang ada di Indonesia terkait implementasi MBKM. Studi yang dilakukan oleh Susetyo (2020) pada 23 dosen di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mengungkapkan hasil yang tidak jauh berbeda terkait permasalahan tersebut. Kebijakan yang parsial, ketiadaan acuan seperti halnya buku panduan, petunjuk pelaksanaan, prosedur operasional dan sejenisnya menjadi penghambat dalam pelaksanaan MBKM. Tanpa adanya panduan atau rambu-rambu yang jelas, dalam studi tersebut dikatakan akan mempengaruhi pelaksanaan MBKM menjadi tidak terarah dan berjalan tidak baik.

Berbagai aspek teknik pelaksanaan yang menjadi pertanyaan dari pengelola prodi membuat pengelola prodi berharap agar pengelola di tingkat universitas melibatkan prodi dalam membuat panduan maupun SOP pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa. Disisi lain, terlihat juga bahwa pengelola universitas berharap agar ada inisiatif dari prodi untuk membuat peraturan-peraturan teknis terkait pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa di prodi masing-masing karena pengelola universitas menyatakan bahwa panduannya sudah jelas. Situasi ini menunjukkan bahwa belum adanya titik temu mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai pembuatan teknis pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa. Pengambil keputusan pada tingkat universitas pada dasarnya merupakan manajer puncak dalam organisasi perguruan tinggi. Dekan dan ketua program studi juga merupakan manajer dalam mengelola fakultas dan program studinya. Kongolo (2019) dalam studi literturnya menyatakan bahwa manajer di perguruan tinggi harus mencari cara produktif dalam menghadapi disrupsi dan situasi yang terus berubah, dan mengelola emosinya serta menjadi sumber kekuatan stabilitas bagi civitas akademika lainnya di universitas. Munculnya kebijakan MBKM dari Kemendikbud merupakan suatu disrupsi yang dialami oleh institusi perguruan tinggi yang menuntut adanya penyesuaian radikal dari metode pembelajaran yang selama ini berjalan. Dengan demikian, pimpinan perguruan tinggi, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan dan wakilnya, serta ketua program tinggi harus mencari cara produktif, mampu mengelola emosi, serta menjadi sumber penguatan satu sama lain, agar tantangan dalam menghadapi penerapan kebijakan MBKM untuk mahasiswa ini bisa dicari solusi bersama. Hal tersebut sejalan dengan salah satu kesimpulan dalam kajian konseptual yang dilakukan oleh Sharabi (2013) bahwa level manajemen di perguruan tinggi, walaupun tidak berperan langsung dalam kegiatan belajar mengajar, tetap memiliki peran penting karena dapat menciptakan sistem pendukung (support system) pembelajaran yang ramah pengguna dan berorientasi kepada konsumen.

Kurangnya sosialisasi mengenai program MBKM untuk mahasiswa dinyatakan baik oleh dekan dan kaprodi sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut kemudian berdampak pada hambatan lainnya yaitu mahasiswa yang belum cukup semester mendaftar untuk mengikuti kegiatan serta munculnya persepsi negatif terhadap kegiatan pada sebagian dosen dan kekhawatiran terhadap berkurangnya jam mengajar karena mata kuliah hilang karena menjadi bagian dari konversi untuk mengakomodasi kegiatan. Hal tersebut kemudian menghambat proses konversi mata kuliah dalam menghadapi kegiatan yang akan datang. Faktor sosialisasi berdasarkan pada studi yang dilakukan oleh Asiah (2021) maupun juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan MBKM baik pada level mahasiswa maupun program studi. Pentingnya peningkatan sosialisasi program di tingkat mahasiswa juga merupakan salah satu temuan dalam riset Riyadi, Harimurti, & Ikhsan (2022). Sosialisasi menjadi sangat penting untuk bisa memahami batasan, syarat, hingga persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia, pendanaan, maupun sistem informasi akademik yang dimiliki Paramadina menjadi pendukung di satu sisi dan menjadi penghambat di sisi lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan pada aspek sumber daya, seperti jumlah dosen untuk menjadi pembimbing kegiatan magang, tenaga kependidikan yang berperan dalam pengisian data pada PDDIKTI, penyiapan sistem informasi untuk mengakomodasi konversi nilai, serta pendanaan untuk berbagai bentuk kegiatan pada program MBKM untuk mahasiswa. Keterbatasan sumber daya ini yang menjadi dasar harapan prodi agar program MBKM untuk mahasiswa yang diadopsi oleh universitas sebaiknya dibatasi saja jumlahnya. Keberadaan sumber daya manusia dan sistem akademik dalam studi yang dilakukan oleh Susetyo (2020) disebutkan memiliki peran yang krusial, Dalam pelaksanaan MBKM, sumber

daya manusia ini harus dibangun dengan baik dan membutuhkan waktu yang tidak bisa instan. Sumber daya manusia ini memiliki peran sebagai penggerak dalam pelaksanaan MBKM. Untuk sistem informasi akademik sendiri, keberadaan aplikasi maupun teknologi yang mendukung akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam implementasi MBKM. Untuk universitas yang belum memiliki sistem akademik yang terintegratif akan memberikan kendala kedepannya. Sehingga diharapkan universitas perlu menyiapkan dengan baik sarana berkaitan dengan sistem akademik tersebut.

Harapan juga diberikan kepada Kemendikbud terkait pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa dari pengelola universitas dan pengelola fakultas. Sosialisasi Kemendikbud dirasakan masih perlu ditingkatkan agar adanya kesamaan persepsi mengenai pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa antar perguruan tinggi dan Kemendikbud. Ada harapan agar Kemendikbud peka terhadap perbedaan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, terutama dalam hal sumber daya dan pendanaan. Pengumuman mengenai program ataupun pelaksanaan masih dirasakan oleh pengelola universitas dilakukan secara mendadak dan dalam waktu singkat sehingga tidak bisa dimaksimalkan oleh program studi. Bantuan pendanaan, seperti hibah, masih dirasakan perlunya oleh universitas agar implementasi program MBKM untuk mahasiswa dapat dilakukan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari bagaimana hibah PK-KM yang diterima oleh Paramadina mendukung sosialisasi program MBKM untuk mahasiswa secara lebih detail dan menyiapkan kurikulum OBE yang mengakomodasi program MBKM untuk mahasiswa.

Dari faktor pendukung dan penghambat yang diidentifikasi serta dinamika yang terjadi antar faktor, beberapa rekomendasi yang bisa diberikan yaitu (1) Kemendikbud sebagai regulator perlu memperjelas dalam sosialisasinya bahwa pemilihan kegiatan untuk program MBKM untuk mahasiswa disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi, supaya tidak memunculkan persepsi pada pengelola perguruan tinggi bahwa kesembilan kegiatan dalam program MBKM untuk mahasiswa harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi, (2) Kemendikbud hendaknya bisa menekankan dalam sosialisasinya bahwa perguruan tinggi harus memastikan bahwa perangkat konversi nilai sudah disiapkan oleh pengelola program studi dan adanya keleluasaan mengenai besaran konversi nilai dan penyetaraan SKS kegiatan dengan SKS mata kuliah yang ada di program studi, (3) Kemendikbud sebagai pengelola kegiatan program MBKM untuk mahasiswa hendaknya menyiapkan sistem informasi, terutama untuk pendaftaran agar mahasiswa yang bisa mendaftar adalah yang sudah masuk semester lima, sesuai dengan panduan yang telah dibuat, (4) Program MBKM untuk mahasiswa merupakan salah satu bentuk perubahan radikal dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Keberlangsungan dari kebijakan yang baik ini untuk mahasiswa perlu dijaga agar efektif dan dampak jangka panjangnya terlihat, (5) Perlu adanya workshop internal dengan melibatkan semua unsur pimpinan universitas, fakultas dan program studi dalam memahami dan menyamakan persepsi akan keberadaan dokumen kebijakan dan acuan yang sudah ada hingga implementasi teknis pelaksanaan yang di dalamnya menentukan dengan jelas bagaimana tugas pokok dan fungsi pada level universitas, fakultas dan program studi, dan (6) Sosialisasi secara komprehensif terhadap kebijakan program MBKM tingkat universitas perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan di seluruh level di Universitas agar program ini tidak dinilai sebagai sesuatu yang menyulitkan ataupun menimbulkan kekhawatiran dosen terhadap produktivitasnya di kampus.

Perlu adanya kebijakan strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan mendasarkan pada analisis SWOT untuk bisa menyiapkan sumber daya baik manusia, sarana-prasarana hingga

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa yang diluncurkan oleh Kemendikbud pada perguruan tinggi swasta serta rekomendasi untuk perbaikan pada kegiatan selanjutnya. Hasil FGD kepada para pengambil kebijakan di lingkungan perguruan tinggi baik di level universitas, fakultas, maupun program studi menunjukkan beberapa faktor pendukung pelaksanaan program MBKM untuk mahasiswa. Adanya inisiatif mahasiswa, kinerja mahasiswa yang sudah ikut dalam program magang, mitra yang sudah bekerja sama, dan arahan Universitas terhadap penggunaan kurikulum berbasis OBE serta dukungan pengelola fakultas dan prodi terhadap mahasiswa yang berminat dengan menyiapkan mekanisme konversi nilai terlepas dari belum siapnya kebijakan dan aturan, merupakan faktor pendukung bagi keberhasilan program ini.

Faktor penghambat program MBKM untuk mahasiswa ini antara lain adalah kurangnya sosialisasi mengenai program MBKM untuk mahasiswa berdampak pada hambatan lainnya yaitu mahasiswa yang belum cukup semester mendaftar untuk mengikuti kegiatan. Persepsi negatif muncul terhadap kegiatan pada sebagian dosen dan kekhawatiran terhadap berkurangnya jam mengajar karena mata kuliah yang diajar menjadi bagian dari konversi untuk mengakomodasi kegiatan. Ketiadaan panduan yang bersifat teknis yang berdampak pada mekanisme konversi nilai serta faktor keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, pendanaan, maupun sistem informasi akademik yang dimiliki Paramadina, juga menjadi faktor penghambat.

Rekomendasi diberikan kepada dua pihak, yaitu kepada Kemendikbud dan kepada internal Universitas Paramadina. Kemendikbud sebagai regulator perlu meningkatkan program sosialisasi dan penyamaan persepsi, memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi dalam pelaksanaannya terutama dalam konversi kurikulum, serta bantuan pendanaan dan sumber daya lain untuk implementasinya. Kepada Universitas Paramadina diharapkan melakukan sosialisasi dalam bentuk workshop internal agar para pengambil kebijakan pada setiap level dapat memahami kebijakan MBKM secara komprehensif, serta menyiapkan kebijakan strategis untuk bisa menyiapkan sumber daya baik manusia, sarana-prasarana hingga keuangan universitas dalam memfasilitasi pelaksanaan MBKM di universitas.

Penelitian ini dilakukan terbatas pada lingkungan Universitas Paramadina sehingga rekomendasi yang diberikan berdasarkan kajian proses yang terjadi di Universitas Paramadina. Pendekatan yang sifatnya kualitatif juga perlu didukung dengan data kuantitatif agar bisa dibandingkan dengan target-target kuantitatif yang ditetapkan. Sebagai bentuk evaluasi program, kajian ini memfokuskan pada tahap proses pelaksanaan, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif mulai dari sisi input hingga luaran dari program MBKM untuk mahasiswa.

Acknowledgment

Artikel ini merupakan luaran dari penelitian yang dibiayai melalui Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2021.

Daftar Pustaka

- Asiah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar). *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat* (Terj: Achmad Fawaid & Rianayati Kusmini Pancasari). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design, 4th Ed.* USA: SAGE Publications.
- Fuadi, T. M. & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*. Vol. 5 No. 2, hal. 603-614
- Kamalia, P. U & Andriansyah,, E. H. (2021). Independent Learning-Independent Campus (MBKM) in Students' Perception. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, Vol, 7 (4), 857 – 867. doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v7i4.4031>
- Kongolo, M. (2019). Management of Higher Education Institutions in Uncertain Times: the perspective of university college. *Journal of Social Science Studies*. Vol. 6 No. 2 pp. 97-107
- Krishna Patria, K. (2021). Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Curriculum In English Studies Program: Challenges and Opportunities. *ELT in Focus* Vol 4 (1), pp. 12-19. doi: 10.35706/eltinf.v4i1.5267
- Mertens, D. M. & Wilson, A. T. (2019). *Program Evaluation Theory and Practice, 2nd Ed.* New York: The Guilford Press.
- Muslikh.(2020). Landasan filosofis dan analisis terhadap kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka. *Jurnal Syntax Transformation*, 1 (3), 40-46.
- Purwanti, E. (2020). Preparing The Implementation of Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Policy in Higher Education Institutions. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 518. *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Social, Humanity, and Education (ICoSIHESS 2020)*.
- Sharabi, M. (2013). Managing And Improving Service Quality In Higher Education. *International Journal Of Quality And Service Sciences*, 5(3), 309–320. doi:10.1108/ijqss-03-2013-0016
- Sopiansyah, D., Masrurroh, S., Zaqiah, Q. Y., Erihadiana, M. (2022). Konsep dan implementasi kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4 (1), 34-41.
- Susetyo. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Prosiding. Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*.
- Riyadi, S., Harimurti, RR. S., & Ikhsan, J. (2022). Dampak Implementasi MBKM terhadap Pengembangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Menuju Research Excellence University. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4 (1), 1018-1029.
- Rozi, F., Prawijaya, S., & Ratno, S. (2021). Development of Interactive E-Modules Based on Google Docs in Basoc Concepts of Biology Curriculum MBKM UNIMED FIP PGSD Study Program. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research volume 591*, Proceedings of The 6th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2021)